

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan negara dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang kini sedang aktif, kita masih melihat perbedaan yang terus terjadi di tengah masyarakat. Hal ini tercermin dalam statistik yang menunjukkan tingginya tingkat kemiskinan, kondisi kesehatan dan lingkungan yang mengkhawatirkan, masalah korupsi dalam birokrasi, kualitas layanan umum yang belum optimal, serta taraf hidup yang rendah di tengah Masyarakat. Isu kemiskinan yang masih menghantui Indonesia saat ini adalah masalah serius yang perlu diatasi. Informasi dari Bank Dunia mengindikasikan bahwa sekitar 28 juta orang di Indonesia masih tergolong dalam kategori miskin.¹ Meskipun terdapat peningkatan dalam kekayaan per individu selama periode 2000-2016, kekayaan rata-rata orang di Indonesia tetap rendah menurut standar internasional.

Tujuan Pembangunan adalah berkelanjutan dan mengatasi masalah kemiskinan, diperlukan tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan distribusi kekayaan yang lebih adil di seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah tantangan yang memerlukan perhatian dan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi semua warga negara.

Bank Dunia atau World Bank masih mengkategorikan mayoritas masyarakat Indonesia sebagai penduduk miskin, dengan porsi sebesar 60,3% dari jumlah penduduk pada 2024 sebesar 285,1 juta jiwa. Persentase penduduk miskin yang setara 171,91 juta jiwa itu didasari dari acuan garis kemiskinan untuk kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas (*upper middle income country*) sebesar US\$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari (kurs Rp 16.800/US\$). Meski masih menjadi

¹"Pengentasan Kemiskinan di Indonesia - World Bank." 22 Okt. 2014, <https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/brief/reducing-extreme-poverty-in-indonesia>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

mayoritas, perkiraan persentase penduduk miskin untuk 2024 itu turun dibanding 2023 yang sebesar 61,8%. Proyeksi tingkat kemiskinan Indonesia pada 2025 pun Bank Dunia perkiraan akan semakin menurun menjadi 58,7%, 2026 menjadi 57,2%, dan pada 2027 menjadi 55,5% “Meskipun permintaan yang kuat telah mendukung kinerja ekonomi yang stabil dan menurunkan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan memerlukan penerapan reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan mengurangi risiko overheating,” dikutip dari laporan Bank Dunia berjudul Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Selasa (29/4/2025).

Ukuran tingkat kemiskinan Indonesia menurut Bank dunia, bisa mendasari acuan garis kemiskinan dalam bentuk Purchasing Power Parity (PPP) kategori international poverty rate yang sebesar US\$ 2,15 per kapita per hari, dan lower middle income poverty rate US\$ 3,65 per kapita per hari. Jika mengacu pada international poverty rate yang sebesar US\$ 2,15 per kapita per hari, maka persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2024 menjadi hanya 1,3% atau setara 3,7 juta orang saja. Sedangkan dengan ukuran garis kemiskinan untuk kategori lower middle income poverty rate sebesar US\$ 3,65 per kapita per hari sebesar 44,47 juta orang atau setara 15,6%. Penting dicatat, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023, setelah mencapai gross national income atau GNI (pendapatan nasional bruto sebesar US\$ 4.580 per kapita. Dengan demikian, ukuran garis kemiskinan yang pantas digunakan untuk Indonesia mengacu pada pengeluaran US\$ 6,85 per kapita per hari atau setara pengeluaran Rp 115.080 per orang per hari, sehingga jumlah penduduk miskinnya setara 60,3% dari total penduduk. Dibanding negara tetangga, jumlah kemiskinan di Indonesia pada 2024 itu peringkat kedua setelah Laos yang sebesar 68,5%.²

Kesenjangan ekonomi yang signifikan di Indonesia, yang mencapai 49%, menempatkan negara ini di peringkat keempat sebagai negara dengan tingginya

² <https://berita.konek.id/2025/04/30/world-bank-603-penduduk-indonesia-miskin-terbanyak-kedua-se-asean>

kesenjangan global.³ Masalah inti yang berhubungan dengan kemiskinan adalah tingkat ekonomi yang rendah (kualitas hidup yang baik), Kesehatan (umur yang Panjang dan kehidupan yang sehat), serta pendidikan (ilmu pengetahuan) di Indonesia. Ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana Indonesia berada pada peringkat yang masih rendah menurut data dari United Nations Development Programme (UNDP).⁴

Mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi, penting untuk mendorong perbaikan dan pengembangan masyarakat. Ini dapat dicapai dengan memberdayakan masyarakat melalui upaya swadaya atau inisiatif mereka sendiri. Masyarakat harus terlibat aktif dalam menemukan apa yang mereka perlukan, mengeksplorasi kemampuan dan aset yang tersedia, serta bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Kesadaran masyarakat tentang kebutuhan mereka, serta penggunaan sumber daya dan potensi desa, merupakan langkah penting menuju pencapaian tingkat kesejahteraan yang diharapkan.

Pemanfaatan bonus demografi menjadi hal yang sangat penting, terutama saat jumlah penduduk usia non-produktif mengalami penurunan dan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030.⁵ Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berfokus pada kemampuan, pendidikan, pengetahuan, perubahan pribadi, pembinaan karakter, dan mental. Ini diharapkan dapat membantu Indonesia bersaing secara global dan mengatasi kemiskinan. Tindakan yang dapat diambil melibatkan adaptasi di dunia kerja, pengembangan keterampilan hidup secara proaktif, kreatif, dan kemampuan berwirausaha. Dalam konteks pandangan Islam, setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ilmu ekonomi, dilihat

³"Ketimpangan Yang semakin lebar - World Bank." <https://pubdocs.worldbank.org/en/986461460705141518/Indonesias-Rising-Divide-Bahasa-Indonesia.pdf>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

⁴"Indeks Pembangunan Manusia-Badan Pusat Statistik." <https://www.bps.go.id/subject/26/index-pembangunan-manusia.html>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

⁵"BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA." <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/download/285/273/>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

sebagai bagian dari tuntunan agama. Islam menekankan bahwa pemenuhan kepentingan sosial adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya memiliki peran penting dalam mencapai kepentingan publik, dan dalam kerangka ini, masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam membentuk aturan yang mendukung kebutuhan seluruh komunitas. Ini menggarisbawahi pentingnya peran agama dan nilai-nilai dalam upaya mengatasi tantangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Ajaran Islam juga sering mendorong untuk berFilantropi dan menekankan pentingnya menghindari ketidaksetaraan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin tentunya dengan manajemen yang baik. Kedermawanan umat Islam memiliki potensi besar dalam pengembangan Filantropi Islam, yang dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat⁶. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji Manajemen Filantropi yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi merupakan aspek yang sangat relevan dan penting untuk dianalisis dalam konteks pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan.

Pemerintah juga semakin memahami potensi dana zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia, Indonesia menyimpan peluang yang sangat besar dalam penghimpunan dana Zakat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah, dan pemerintah telah berupaya mengoptimalkan peran lembaga zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Potensi zakat yang besar ini memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Menurut Abidin, gerakan Filantropi saat ini tengah mengutamakan peningkatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggapan terhadap pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang belum dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah⁷. Masalah sosial seringkali hanya

⁶"filantropi islam sebagai pemberdayaan ekonomi." <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/6424/2290>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

⁷"Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik" <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1630/1767>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

terselesaikan secara permukaan, dan lembaga Filantropi hadir untuk mengatasi problematika tersebut. Banyak pegiat Filantropi yang, meskipun memiliki status sosial dan kekayaan, masih membutuhkan interaksi sosial dan kepuasan dalam berkontribusi pada masyarakat, yang diwujudkan melalui kegiatan Filantropi. Penelitian yang membahas keberlanjutan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa agama dapat memainkan peran penting dalam mencapai keberlanjutan ekonomi⁸. Agama dapat memberikan kontribusi terhadap SDGs melalui nilai-nilai Islam, potensinya untuk aktivisme ekologi, sosial, dan politik, serta kemampuannya untuk mendukung pengembangan diri.

Lembaga Filantropi, seperti Dompot Dhuafa, lazisMu, lazisNu telah berkembang pesat dan memanfaatkan dana secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kaum dhuafa. Program-program yang mereka kelola, seperti Dakwah, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Sosial, merupakan bentuk dukungan sektor swasta terhadap pemerintah dalam upaya mencapai SDGs⁹. Dalam konteks pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai pendekatan efektif untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan. Dalam konteks ini, organisasi amal Islam memiliki peran penting. Mereka membantu masyarakat mengelola zakat, yang merupakan salah satu bentuk Filantropi dalam Islam, dan mendistribusikannya kepada yang memenuhi syarat. Filantropi Islam juga melibatkan tindakan sukarela untuk kepentingan umum, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang mendorong berbagi dan kepedulian sosial.

Fondasi utama amal Islam adalah Al-Quran, yang memberikan panduan dalam melaksanakan tindakan Filantropi ini. Dengan melibatkan organisasi amal Islam, masyarakat dapat lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya

⁸"Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs." http://repository.syekhnujati.ac.id/8194/1/3.%20Jurnal%20Sinta%203_Al-Qur%E2%80%99an%20dan%20Pembangunan%20Lingkungan.pdf. Diakses pada 10 Nov. 2023.

⁹"Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi" <https://www.neliti.com/id/publications/492435/filantropi-islam-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-masa-pandemi-covid-19-studi-kasu>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

Filantropi untuk mendukung upaya pemberdayaan dan mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan.

Surat Ali Imran: 180

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka pikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Kontribusi Filantropi dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat signifikan tentunya dengan manajemen yang baik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam yang mengajarkan kepedulian sosial dan etika berdasarkan nilai-nilai agama.

Laut merupakan elemen krusial dalam kehidupan untuk berbagai jenis tumbuhan dan hewan, laut berperan sebagai habitat bagi ekosistem dan bagi manusia, laut bisa menjadi salah satu sumber nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Karena laut penting bagi banyak orang, penting untuk memanfaatkan potensi sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Nelayan dapat memperoleh manfaat dengan memancing di laut, sementara pihak lain dapat meraih keuntungan dengan mengembangkan lokasi pariwisata yang berhubungan dengan lautan. Dengan banyaknya wilayah perairan, Indonesia disebut sebagai "negeri maritim". Perbedaan antara luas wilayah daratan dan perairan Indonesia ditunjukkan di sini.

Tabel 1.1
Perbandingan Luas Wilayah Daratan dan Perairan Indonesia

No.	Wilayah	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1.	Daratan	1,92 Juta	37,1

2.	Perairan	3,25 Juta	62,8
----	----------	-----------	------

Sumber data: Dokumentasi dari website BPS¹⁰

Melalui tabel di atas terlihat perbandingan luas wilayah perairan lebih luas dibanding daratan. Bahkan berdasarkan panjang garis pantai, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan garis pantai terpanjang. Adapun urutan lima besar negara dengan garis pantai terpanjang sebagai berikut.

Tabel 1.2
Urutan Negara Dengan Garis Pantai Terpanjang di Dunia

No.	Negara	Luas (Km ²)
1.	Kanada	202.080
2.	Indonesia	99.083
3.	Norwegia	58.133
4.	Rusia	37.653
5.	Filipina	36.289

Sumber data: Dokumentasi dari sebuah website¹¹

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi kedua di dunia dalam hal panjang garis pantai. Ini menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia sangat luas dan memiliki berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan manusia. Masyarakat pesisir adalah orang-orang yang tinggal di dekat pantai.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pulau. Yang ada juga memiliki garis pantai yang membentang di seluruh pulau. Sebagai pulau terpadat, pulau Jawa memiliki banyak penduduk dengan berbagai tingkat ekonomi. Lamongan adalah salah satu wilayah dengan potensi pesisir yang sedang berkembang. Menurut situs web resmi pemerintah Kabupaten Lamongan, ada empat sektor utama yang dapat berkembang di wilayah ini: penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan serta pemasaran produk perikanan dan pemberdayaan serta pengawasan melalui produksi garam.¹² Potensi 4 sektor pesisir tersebut pada tahun 2022 sebagai berikut:

¹⁰ <https://www.bps.go.id>, Diakses pada 30 November 2023

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id>, Diakses pada 30 November 2023

¹² <https://lamongankab.go.id>, Diakses pada 30 November 2023

Tabel 1.3
Hasil Produksi Sektor Pesisir Lamongan Tahun 2022

No.	Sektor	Hasil
1.	Perikanan Tangkapan	Hasil tangkapan sektor perairan laut dicapai sebesar 80.170,34 Ton dengan total nilai produksi Rp. 1.394.411.533.000.
2.	Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya mencapai 62.754,85 Ton dengan total nilai produksi Rp. 1.577.347.888.000.
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Terdapat 1.280 industri dan tenaga pengolah sebanyak 6.060 serta total produksi mencapai 91.352,30 Ton.
4.	Produksi Garam	Memiliki lahan produksi seluas 222,07 Ha dengan nilai produksi mencapai 2.599,32 Ton. Terdapat 25 kelompok petambak yang beranggotakan 253 orang.

Sumber data: Dokumentasi dari website pemerintah Lamongan¹³

Hasil produksi sektor perairan di atas tentu juga dibantu oleh sarana dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang kegiatan produksi. Berikut Fasilitas produksi hasil perairan yang dimiliki Lamongan.

Tabel 1.4
Fasilitas Produksi Hasil Perairan Lamongan

No.	Fasilitas	Jumlah
1.	Armada/Perahu Penangkap Ikan	3.423 unit
2.	Alat Tangkap Ikan	52.269 unit
3.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 tempat yakni TPI Lohgung, TPI Labuhan, TPI Brondong, TPI Kranji dan TPI Weru.

Sumber data: Dokumentasi dari website pemerintah Lamongan¹⁴

Karena dua pertiga wilayah adalah perairan, pembangunan ekosistem laut sangat penting. Indonesia adalah negara yang kaya dan beragam. Lautan memiliki banyak kekayaan alam.

Pemberdayaan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir

¹³ <https://lamongankab.go.id>, Diakses pada 30 November 2023

¹⁴ <https://lamongankab.go.id>, Diakses pada 30 November 2023

terdapat banyak kelompok. Setiap kelompok masyarakat tersebut harus mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap ikan, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok.

Kemiskinan masyarakat pesisir merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, bukan solusi secara parsial. Oleh karena itu, harus diketahui akar yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat pesisir. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; Kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* (perintahkan kebawah) dan selalu menjadikan masyarakat pesisir sebagai objek, bukan subjek.

Masalah kemiskinan masyarakat pesisir memiliki banyak aspek, pendekatan yang komprehensif diperlukan dibandingkan solusi yang setengah hati. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab utama yang mengakibatkan kemiskinan masyarakat pesisir. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat pinggiran pantai terus miskin. Beberapa di antaranya adalah kebijakan pemerintah yang tidak membantu masyarakat yang kurang beruntung, dan banyak strategi pengentasan kemiskinan yang dibuat dari atas ke bawah dan memperlakukan masyarakat pesisir sebagai objek daripada subjek. Menurut Nur Syam Kaum nelayan tergantung kepada keadaan laut, jika cuaca baik biasanya di bulan Juni-September maka penghasilan mereka pun baik. Pada waktu inilah dunia kaum nelayan adalah masa panen. Sementara

bulan lainnya adalah bulan pacelik atau plait.¹⁵ Pada bulan panen ini tidak masyarakat pesisir khususnya desa paciran dan kranji tak mengenal waktu siang malam tempat pelelangan ikan (TPI) rame. Hituk pikuk penimbangan dan jual beli ikan dengan ciri khas nya senyum dan tertawa lepas para penjual makanan dan minuman (warung) di sekitae TPI juga buka untuk melayani mereka. Hal ini adalah gambaran bahwa masyarakat pesisir adalah terbuka dan suka tolong menolong.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan Bersama. Manajemen ini melibatkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan teknologi dan lainnya yang di lakukan secara terstruktur dan terencana untuk mencapai cita-cita dan tujuan secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kinerja secara menyeluruh. Dalam sebuah organisasi tentunya mempunyai ciri kahas masing-masing. Filantropi adalah individu atau kelompok yang suka memberi atau berderma dengan penuh kasih sayang kepada sesama manusia untuk membeberikan atau menyumbangkan waktunya, uang, tenaga, atau hartanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, baik di lakukan secara individu maupun teroganisir hal inilah yang di sebut dengan manajemen Filantropi,

Kecamatan Paciran adalah salah satu kecamatan yang terletak di pantai utara pulau Jawa timur, dikenal sebagai daerah pesisir dengan garis pantai yang panjang yang memiliki 16 desa dan 1 kelurahan, sehingga total ada 17 desa/kelurahan, yaitu Desa Banjarwati, Blimbing, Drajat, Kandangsemangkon, Kemantren, Kranji, Paciran, Paloh, Sendangagung, sendangduwur, Sidokelar, Sidokumpul, Sumurgayam, Tlogosadang, Tunggul, Warulor dan weru. Mata pencarian rata-rata adalah nelayan dan petani

Desa Kranji dan Paciran, yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang unik. Namun, sebagai daerah pesisir, Desa Kranji dan Paciran menghadapi tantangan

¹⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (LKIS Yogyakarta: 2005), Hlm 52.

husus, termasuk keterbatasan akses terhadap pasar dan peluang ekonomi. Penelitian oleh Usman pada tahun 2020 menunjukkan bahwa daerah pesisir sering mengalami keterbatasan ini, potensi Filantropi di dua desa ini adalah sangat besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun alam sehingga penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana Filantropi dapat berkembang dan di kelolah di dua desa tersebut. Keterlibatan masyarakat tentang manajemen Filantropi di desa Kranji dan desa Paciran dapat membantu memahami bagaimana masyarakat masyarakat terlibat dalam kegiatan Filantropi. Desa Kranji dan Desa Paciran dapat menjadi studi yang baik untuk memahami manajemen Filantropi di masyarakat pesisir.

Konsep Filantropi merupakan salah satu opsi bagi suatu kelompok untuk mengurangi disparitas sosial di antara masyarakat pesisir, dengan manajemen Filantropi yang baik, Tujuannya adalah menciptakan dan memelihara kesejahteraan hidup serta martabat manusia yang memiliki kemampuan berpikir. Filantropi Islam mendorong aktivitas komunitas manusia, khususnya umat Islam, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan perintah Allah SWT tentang zakat, infaq, sadaqah, wakaf, dan elemen sosial lainnya. Semangat berderma diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok yang berkecukupan dan yang kurang beruntung.

Di Indonesia, keberadaan berbagai lembaga Filantropi diharapkan memberikan dampak positif dalam mengatasi kemiskinan dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian umat. Oleh karena itu, dalam mengelola dan memanfaatkan dana zakat, organisasi amal perlu mengadopsi konsep manajemen sebagai metode untuk melaksanakan proses pengelolaan aktivitas lembaga. Manajemen, sebagai proses pengendalian kegiatan, dianggap sebagai ilmu dan seni yang terlibat dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam mengelola organisasi.

Manajemen Filantropi menawarkan peluang yang signifikan untuk mempercepat kemajuan di Indonesia. Dalam Islam, ide Filantropi diungkapkan melalui zakat, infak, dan sedekah, yang mendorong Masyarakat Muslim untuk

memberikan sumbangan dan memastikan kekayaan tidak terpusat hanya pada segelintir orang yang kaya. Prinsip-prinsip Filantropi ini berlandaskan ajaran al-Qur'an dan hadis Nabi yang menetapkan ketentuan-ketentuan spesifik, seperti kategori harta, besaran minimal, jumlah dan peraturan lainnya.¹⁶ Usaha untuk mencapai kesejahteraan yang merata dapat dilakukan melalui inisiatif untuk memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan secara luas, terstruktur dengan baik, serta berkelanjutan. Lebih jauh, perkembangan lembaga Filantropi di Indonesia merupakan topik yang patut diteliti lebih jauh. Potensi sosial-ekonomi yang terus berkembang di Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan program Filantropi yang dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan. Manajemen Filantropi dapat diartikan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Studi ini, yang mengeksplorasi kontribusi Filantropi Islam, menyoroti tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat pesisir, seperti keterbatasan akses pasar dan infrastruktur. Filantropi Islam, terutama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dianggap sebagai faktor kunci dalam mendukung kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik terhadap Filantropi dan masyarakat pesisir, dengan fokus khusus pada Desa Kranji dan Paciran. Penelitian mencakup analisis konteks sosial-ekonomi desa, identifikasi manajemen Filantropi, tantangan dan peluang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, serta evaluasi mendalam terhadap efektivitas program Filantropi. Dengan melibatkan kajian literatur, survei, wawancara, dan analisis data, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program Filantropi dengan manajemen yang baik di Desa Kranji dan Paciran. Sehingga, diharapkan penelitian ini dapat memberikan panduan berharga untuk memperkuat implementasi Filantropi Islam di daerah pesisir secara lebih efektif.

¹⁶"MULTI LEVEL FILANTROPI ISLAM (MLFI)." 23 Agu. 2022, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/14173/pdf/35999>. Diakses pada 10 Nov. 2023.

Penelitian ini menggunakan model *Pentahelix* dimana model ini adalah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas yang masing-masing mempunyai peran masing-masing. Pemerintah dalam hal ini adalah berperan sebagai pengatur dan pengawasan hal ini dilakukan adalah untuk mengawasi kegiatan filantropi ini jujur, adil, transparan dan akuntabel. Akademisi dapat berperan melakukan riset, mengembangkan model manajemen, dan memberikan pelatihan kepada lembaga-lembaga Filantropi dan mengevaluasi dampak dan keberlanjutan program-program filantropi.

B. Batasan Masalah

Penelitian Manajemen Filantropi Islam Masyarakat Pesisir ini hanya pada dua desa yaitu Desa Kranji dan Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesadaran Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Manajemen Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana Model Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kesadaran Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Menganalisis Manajemen Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
3. Menganalisis Model Filantropi Islam masyarakat pesisir di Desa Kranji dan Paciran kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

E. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

- a. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang berkaitan dengan FILANTROPI ISLAM MASYARAKAT PESISIR: Studi di Desa Kranji dan Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - b. Bagi Program Studi Doktor Studi Islam UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SYEKH WASIL KEDIRI merupakan tambahan penelitian studi kasus selanjutnya untuk dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan ekonomi yang berkaitan dengan dengan FILANTROPI ISLAM MASYARAKAT PESISIR: di Desa Kranji dan Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Aspek praktis
- a. Temuan dari penelitian ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat.
 - b. Temuan dari studi ini dapat berfungsi sebagai acuan untuk komunitas akademik yang terlibat dalam bidang kewirausahaan.
 - c. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman atau sumber informasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, pelaku wirausaha, serta pengelola organisasi yang berkaitan dengan wirausaha. lembaga advokasi entrepreneurship, lembaga konsultasi entrepreneurship agar bisa berkembang lebih baik.
 - d. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai pedoman bagi individu atau kelompok yang ingin memulai usaha yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana sumbangsih ilmu pengetahuan dalam studi ini dan jumlah peneliti lain yang telah membahas isu yang dianalisis dalam disertasi ini.

Untuk itu peneliti telah mengkaji berbagai buku terbaru serta publikasi, baik dari artikel jurnal maupun dari disertasi. Penelitian ini bukanlah sekedar

pengulangan atau penjiplakan dari studi-studi sebelumnya; terdapat penelitian lain dengan perspektif yang berbeda, seperti yang dijelaskan berikut:

Penelitian terdahulu menjadi titik awal ide yang melahirkan topik penelitian penulis, antara lain:

1. Lilis Fauziah Balqis, dengan Judul “Pendidikan Filantropi Untuk Perempuan Berbasis Kewirausahaan Perspektif Al-Qur’an” Fokus utama riset ini adalah mengidentifikasi makna Pendidikan Filantropi bagi kaum perempuan. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana kontribusi aktivitas kewirausahaan yang dijalankan oleh perempuan. Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa penyerapan nilai-nilai Al-Qur’an dalam setiap kegiatan Filantropi yang berbasis pada kewirausahaan yang dilakukan oleh perempuan tidak hanya mampu menumbuhkan kemandirian pada diri mereka, tetapi juga berpotensi menghasilkan sebuah model Pendidikan Filantropi berbasis kewirausahaan dengan perspektif Al-Qur’an. Guna mewujudkan konsep ini, diperlukan serangkaian usaha yang terstruktur dalam sistem Pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan gender, sehingga perempuan memiliki hak yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut pada akhirnya akan sangat bergantung pada tingkat keyakinan spiritual (teosentris) yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri. Dengan demikian, seorang perempuan meraih pendidikan tinggi, kesempatan untuk memperoleh pendapatan mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Filantropi akan semakin luas. Berdasarkan pemahaman ini, teori yang dikembangkan dalam disertasi ini adalah tentang humanisme atau Filantropi teosentris, yang menekankan bahwa naluri dasar wanita disalurkan menuju tingkat keimanan dalam kegiatan Filantropi.¹⁷
2. Andri Irawan dan Laurensia Tanzil melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan

¹⁷ Lilis Fauziah Balqis, “Pendidikan Filantropi Untuk Perempuan Berbasis Kewirausahaan Perspektif Al-Qur’an” (Disertasi, Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, 2021), III.

Kesejahteraan Masyarakat.¹⁸ Penelitian ini mengeksplorasi program yang bertujuan untuk memberdayakan komunitas di kawasan pesisir perbatasan serta elemen-elemen yang memengaruhinya. Ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini mengidentifikasi tiga parameter yang berfungsi sebagai instrument untuk mengevaluasi pemberdayaan komunitas pesisir perbatasan, di mana indikator pertama berkaitan dengan tahap kesadaran dan pembentukan perilaku yang telah berhasil dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Indikator kedua, yaitu fase transformasi keterampilan, dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan mengenai teknik pengolahan ikan, manajemen keuangan, dan promosi pemasaran. Selanjutnya, indikator ketiga dalam tahap peningkatan kemampuan terlihat dari bertambahnya jumlah usaha baru yang didirikan oleh warga desa yang berkaitan dengan bidang perikanan, serta adanya pertumbuhan sekitar 43% di kalangan masyarakat yang telah mengembangkan bisnis mereka, baik dalam penangkapan maupun pengolahan ikan. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Kampung Tomer termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya dukungan dari pemerintah, dan isu terkait anggaran. Di sisi lain, faktor yang mendukung termasuk sistem sosial budaya masyarakat setempat, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, serta partisipasi aktif dari penduduk lokal. Persamaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan terdapat pada konteks penelitian dan teori yang akan diimplementasikan untuk melihat dampak penerapan pemberdayaan ekonomi terhadap komunitas pesisir.

3. R. Drajat Subagio, Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) Di Kabupaten Subang dan Cirebon.¹⁹

¹⁸ Andi Irawan and Laurenzia Tanzil, "Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial," Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosia, November 2020, <http://ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas>.

¹⁹ Hevia Purnama Sari, "Analisis Keragaman Genetik Akses Lansium Spp. Berdasarkan Karakter Morfologi Vegetatif Dan Marka Simple Sequence Repeat," February 1, 2021, <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106003>.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Subang dan Cirebon dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh program PEMP terhadap KMP serta mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan masyarakat. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa program PEMP memberikan dampak positif bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan manfaat, dan faktor-faktor yang berperan adalah persepsi dan keterampilan/bisnis penerima. Hal ini dikarenakan desain pelaksanaan program PEMP yang dilakukan berupa penyediaan modal usaha untuk kelompok masyarakat yang dipilih. Kesamaan penelitian ini dengan studi yang dilaksanakan oleh R Drajat Subagio terletak pada objek yang diteliti, yaitu program PEMP bagi masyarakat di daerah pesisir, sementara perbedaan terdapat pada karakteristik kelompok penerima, lokasi penelitian, metode yang digunakan, dan teori yang diterapkan.

4. Hilmi Hasbullah, Dengan Judul “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)” Penelitian ini menyoroti cara pemahaman, penerimaan, dan pelaksanaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga yang mengelolanya serta bagaimana pengelolaan wakaf uang oleh lembaga-lembaga tersebut berkembang setelah enam tahun diberlakukannya undang-undang di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif fenomenologis sebagai pilihan penelitian. Regulasi wakaf uang sebagai materi “law in Book” Dalam Undang-Undang Wakaf serta regulasi terkait lainnya, dilakukan analisis pada aspek pelaksanaan dan penerimaan dari para pemangku kepentingan yang mengelola wakaf uang sebagai “hukum dalam masyarakat”. Teori yang diterapkan mencakup perubahan hukum dan sosial, perilaku serta efektivitas hukum, serta manajemen Filantropi, keadilan sosial, dan bisnis sosial. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan: 1) adanya variasi dalam pemahaman dan tingkat penerimaan terhadap regulasi pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga yang menjadi fokus penelitian 2) munculnya variasi dalam perkembangan pengelolaan wakaf uang. Selain itu, wakaf uang yang dirancang sesuai ketentuan UU kurang mendapatkan respons positif dari Masyarakat. Wakaf dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan UU kurang

mendapatkan perhatian dari publik. Wakaf uang yang dipahami sebagai sarana untuk dijadikan aset wakaf sosial atau produktif berkembang dengan cepat dalam masyarakat. Aturan tentang wakaf uang telah mereduksi keabsahan proses wakaf tunai yang ada di masyarakat, yang berdampak pada munculnya sikap hukum yang menghindar atau mengabaikan hukum. Penghindaran terhadap aturan wakaf uang ini terjadi dengan beralih ke model sumbangan lainnya. Pengabaian aturan terjadi meskipun tetap berpegang pada konsep wakaf tunai yang sudah dipahami. Aturan mengenai wakaf uang kurang mendukung realisasi wakaf uang sebagai sarana pemberdayaan dan kesetaraan ekonomi di Masyarakat. Skema pengelolaan wakaf uang harus diperbaiki dengan menjadikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pengelola dan memanfaatkan dana wakaf uang sebagai modal untuk bisnis sosial yang terintegrasi. Wakaf tunai untuk pengembangan sarana ekonomi produktif dan sosial yang ada di Masyarakat perlu diintegrasikan sebagai model wakaf dengan pengelola selain Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini menunjukkan bahwa teori rekayasa sosial gagal dalam merubah hukum, terutama dalam bidang hukum administratif dan hukum yang berkaitan dengan keyakinan serta pandangan agama di masyarakat. Perubahan hukum hanya menghasilkan keacuhan atau penghindaran dari masyarakat.²⁰

5. Matthoriq; Suryadi; Mochamad Rozikin. Melakukan penelitian dengan judul Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajah Rejo, Kec. Gedangan Kab. Malang).²¹ Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi nilai-nilai Islam dalam pemberdayaan komunitas pesisir dapat dilihat melalui tiga aspek kultural, yaitu aspek sosial, aspek keluarga, dan aspek pendidikan. Kesamaan antara studi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada gagasan pemberdayaan untuk komunitas pesisir serta

²⁰ Hilmi, Hasbullah “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” (Disertasi, IAIN Walisongo, 2012), V.

²¹ Matthoriq Matthoriq, “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya* 2, no. 3 (January 1, 2014): 426–32.

pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian. Sementara itu, perbedaan muncul dari setting dan tujuan penelitian, di mana studi terdahulu lebih menekankan penggalian nilai-nilai keislaman dalam masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dari berbagai bidang, sementara penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada satu bidang, yaitu ekonomi komunitas pesisir. Kesamaan terletak pada metodologi penelitian yang dipakai serta dasar teori yang digunakan, yaitu bertujuan untuk menggabungkan dan menghubungkan konsep pemberdayaan dalam masyarakat pesisir dengan nilai-nilai keislaman.

6. Harson Gasim melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pasuruan.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber utama dari model yang memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir baik secara teoritis maupun praktis untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dan memakai tiga teori, yaitu teori ekonomi klasik, teori ekonomi liberal, dan teori radikal, yang menunjukkan adanya keselarasan dalam sasaran ekonomi antara ketiga pendekatan tersebut dalam konteks pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum. Rekomendasi dari penelitian ini mengarahkan peneliti untuk melakukan pengujian dengan pemanfaatan teori yang berbeda, yaitu paradigma ekonomi Islam dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir. Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus yang sama, yaitu melihat aspek pemberdayaan ekonomi dari masyarakat pesisir. Sementara itu, perbedaannya terletak pada pengaturan penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teori yang diterapkan.
7. Fuad Hasyim dengan judul Jurnal, “Gerakan Filantropi Islam di Amerika” (2018), Jurnal Studi Al-Qur’an, Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menghasilkan temuan yang mengindikasikan adanya empat landasan

²² Harson Gasim, “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo,” *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)* 6, no. 1 (December 6, 2017): 30, <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.30-40.2017>.

kelembagaan utama dalam gerakan Filantropi Islam di Amerika Serikat, meliputi masjid, institusi pendidikan, kelompok etnis, serta aliran atau mazhab pemikiran. Selain itu, penelitian ini juga menemukan korelasi yang sangat kuat antara keberadaan organisasi Filantropi Islam dengan kebijakan politik pemerintah terkait isu radikalisme yang seringkali diasosiasikan dengan komunitas Muslim di Amerika.²³

8. Sauqi Futaqi dengan judul “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Pijoengan Yogyakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengelolaan pendanaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Piyungan, Bantul, serta strategi pendanaan program Rumah Pintar (Rumpin) BAZNAS Piyungan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa pendanaan Rumpin BAZNAS Piyungan diperoleh melalui dua mekanisme utama. Pertama, sumber dana berasal dari alokasi zakat yang disalurkan melalui BAZNAS pusat. Kedua, melalui pengalokasian anggaran internal Rumpin yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan alokasi anggaran ini dipicu oleh bertambahnya kebutuhan layanan yang diajukan oleh para penerima manfaat. Peningkatan pendanaan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan layanan pendidikan. Hal ini tercermin dari berbagai pencapaian yang diraih, di antaranya Rumpin BAZNAS Piyungan menerima penghargaan sebagai Rumpin terbaik dalam pengembangan sentra untuk kategori non-departemen, Penghargaan Pustaka Bhakti Tama sebagai penggerak literasi, serta sejumlah sertifikat pelatihan yang memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat dalam mencari pekerjaan.²⁴
9. Deden Gandana Maja Kusuma dengan judul Jurnal, “Pengelolaan dana Filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat” (2020), Pascasarjana Universitas Islam Bandung. Artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk

²³ Hasyim, Fuad. “Gerakan Filantropi Islam Di Amerika”. Jurnal Studi Al-Qur’an 14, no. 1 (January 1, 2018): 16 - 31. Accessed January 25, 2022. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/5449>.

²⁴ Sauqi Futaki, “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam : Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta” (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2018.. Vol. No. 220), 231.

menganalisis pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF), yang memungkinkan penulis menyimpulkan bahwa dana tersebut berpotensi besar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, temuan saat ini menunjukkan bahwa alokasi dana ZISWAF cenderung lebih dominan pada kegiatan sosial, bantuan kemanusiaan, santunan anak yatim, serta pembangunan sekolah dan madrasah. Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun dana ZISWAF memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi umat, implementasinya saat ini lebih terfokus pada kegiatan sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, dan pembangunan sekolah madrasah.

10. Murtika Sari Siregar, dengan judul jurnal “Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya” Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai strategi, implementasi, serta implikasi dari pengembangan pendanaan yang berlandaskan Filantropi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan beberapa aspek krusial: (1) Pendanaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam mencakup: (a) Penghapusan biaya pendidikan untuk anak-anak yatim, (b) Kegiatan untuk menyebarkan pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga tingkat atas, (c) Berperan sebagai sumber pemasukan bagi lembaga pendidikan. (2) Penetapan anggaran sumber dana pada setiap inisiatif Pendidikan Yatim Mandiri Surabaya disalurkan melalui mekanisme beasiswa dan anggaran operasional untuk entitas pendidikan di bawah naungannya, seperti pesantren Insan Cendekia Mandiri (ICBMS), SMA Islam An-Najah Indonesia Mandiri (STAINIM), dan Sekolah Mandiri Entrepreneur Center (MEC).²⁵

Beberapa Penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam riset ini, peneliti memahami bahwa studi-studi tersebut saling berkaitan dan memiliki kesamaan, baik secara langsung maupun tidak, dalam cara penyampaian dan struktur yang digunakan. Dengan demikian, peneliti menyadari bahwa riset

²⁵ Murtika Sari Siregar, dengan judul jurnal “Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya” (Jurnal, Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), Vol. 5 No.1, 82-97

yang dilakukan bukanlah penelitian yang sepenuhnya baru, melainkan merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini tentu menempatkan fokus pada rekomendasi teoritis dan akademis dari peneliti sebelumnya, dalam upaya untuk mengembangkan literatur mengenai Filantropi Islam di kalangan masyarakat pesisir. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menyajikan tabel yang mencakup nama peneliti, judul penelitian, tahun penelitian, serta objek yang diteliti seperti berikut ini:

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Objek Kajian
1	Lilis Fauziah Balqis	Disertasi “Pendidikan Filantropi Untuk Perempuan Berbasis Kewirausahaan Perspektif Al Qur'an”	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pendidikan Filantropi bagi Wanita yang Mengacu pada Kewirausahaan dalam Pandangan Al Qur'an.
2	Andri Irawan dan Laurensia Tanzil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Penelitian ini menganalisis program pemberdayaan masyarakat pesisir perbatasan serta faktor faktor yang mempengaruhinya
3	R. Drajat Subagio	Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) Di Kabupaten Subang dan Cirebon	Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Subang dan Cirebon dengan tujuan menganalisa dampak program PEMP terhadap KMP dan mengkaji faktor yang mempengaruhi pendapatan Masyarakat
4	Hilmi Hasbullah	Disertasi “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU	Penelitian ini menunjukkan bahwa teori rekayasa sosial gagal dalam merubah hukum, terutama dalam hal hukum administratif dan

No	Nama peneliti	Judul	Objek Kajian
		No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”	hukum yang berhubungan dengan pandangan serta kepercayaan agama di masyarakat. Perubahan hukum tersebut hanya menghasilkan pengabaian atau penolakan dari pihak masyarakat.
5	Matthoriq; Suryadi; Mochamad Rozikin	Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi pada Masyarakat Bajulmati, Gajah Rejo, Kec. Gedangan Kab. Malang)	Penelitian ini menyelidiki penerapan nilai-nilai Islam dalam penguatan komunitas pesisir yang tersedia dalam tiga aspek budaya masyarakat, yaitu aspek sosial, aspek keluarga, dan aspek pendidikan.
6	Matheus Nugroho	Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Pasuruan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber utama dari model penguatan ekonomi bagi komunitas pesisir, baik dalam segi teori maupun penerapannya, agar tujuan pemberdayaan tersebut dapat tercapai.
7	Fuad Hasyim	Gerakan Filantropi Islam di Amerika	Penelitian ini meneliti tentang pertumbuhan Filantropi Islam di Amerika, termasuk aspek berkaitan dengan lembaga Filantropi Islam dan kontribusinya terhadap solidaritas dan pemberdayaan umat Islam di Amerika.
8	Sauqi Fotaqi	Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam : Strategi Rumah Pintar BAZNAS Pijoengan Yogyakarta.	Penelitian ini berfokus pada pembiayaan Pendidikan di Lembaga Filantropi Islam.

No	Nama peneliti	Judul	Objek Kajian
9	Deden Gandana Maja Kusuma	Pengelolaan dana Filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat	Penelitian ini berfokus pada manajemen keuangan Filantropi Islam
10	Murtika Sari Siregar	Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim Di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi pelaksanaan serta dampaknya terhadap pendanaan yang berlandaskan Filantropi.

G. Definisi Istilah

Untuk mencegah kesalahan dalam pengucapan atau pemahaman, penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian dengan cara mendefinisikannya sebagai berikut:

1. Manajemen

Manajemen dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan pengelolaan suatu tugas untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pengoptimalan sumber daya manusia yang tersedia agar bekerja secara terarah dan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Sementara itu, konsep Filantropi Islam berakar dari kata *philanthropia*, yang dalam bahasa Yunani terdiri dari 'philo' dan 'anthropos', keduanya bermakna cinta terhadap sesama manusia.

2. Filantropi

Kegiatan sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui pemberian bantuan, donasi, atau kegiatan lainnya. Filantropi dapat dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Filantropi dapat didefinisikan juga sebagai manifestasi kepedulian individu maupun kelompok terhadap sesama, yang dilandasi oleh rasa kasih sayang antar manusia. Dalam konteks Islam, Filantropi merupakan suatu mekanisme pengelolaan pemberian atau aksi kedermawanan seseorang kepada institusi Pondok Pesantren, dalam bentuk

Donasi, Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Dana tersebut kemudian dikelola dan dikembangkan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh seluruh komponen pesantren. Masyarakat memainkan peran signifikan dalam pembangunan pesantren, yang diwujudkan melalui beragam kontribusi, baik berupa bantuan materiil maupun non-materiil.

3. *Pentahelix*

Model kolaborasi yang melibatkan lima *stakeholder* utama dalam pembangunan suatu wilayah atau komunitas. Kelima *stakeholder* adalah pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan komunitas

4. Model

Representasi atau abstraksi dari suatu sistem, obyek, atau konsep yang digunakan untuk memahami, menganalisis, atau memprediksi perilaku atau kinerja sistem tersebut. Dalam konteks manajemen Filantropi, model dapat digunakan untuk memahami bagaimana Filantropi dapat dikelola dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.